
EFEKTIVITAS REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS DI DINAS SOSIAL KABUPATEN SUMEDANG

Indra Wahyudinata*¹, Adjie Muhammad Fadjri², Ai Rohayatin³, Andriansah Maulana⁴,
Dini Anisa⁵, Rissa Ismaya⁶
^{1,2,3,4,5,6}Universitas Sebelas April

Article Info

Article history:

Received Sept 10, 2024

Revised Des 11, 2024

Accepted Des 20, 2024

Keywords:

Public Policy

Program Effectiveness

Rehabilitation

ABSTRACT

This research aims to find out how effective the implementation of Social Rehabilitation for Persons with Disabilities is at the Sumedang Regency Social Service. The method used in this research is qualitative method. Determining informants in this research used purposive sampling. There were three informants, consisting of: Service Secretary, Functional Officer, Young Social Rehabilitation Expert Worker, and Companion for Persons with Disabilities. The data collection techniques used were literature study and field study consisting of observation, interviews and documentation. Meanwhile, the data processing procedures in this research are data reduction, data display, data conclusion drawing/verification and triangulation. Based on the research results, it was concluded that this program had been implemented well but was not yet optimal. The inhibiting factors in program effectiveness are limited budget, inadequate infrastructure and incomplete program outreach. Efforts to overcome factors inhibiting the effectiveness of the program include identifying the use of funds, holding outreach with TKSK, and analyzing the condition of infrastructure to improve care and maintenance.



Copyright © 2024 JRPA. All rights reserved.

Corresponding Author:

Indra Wahyudinata

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sebelas April

Jl. Angkrek Situ No 19 Kelurahan Situ - Sumedang

Email: indra_wahyudinata@unsap.ac.id

1. INTRODUCTION

Indonesia merupakan negara yang masih terus melakukan pembangunan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat sesuai dengan pasal 33 UUD 1945, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Di dalamnya berupa pembangunan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan sosial. Tidak hanya menyangkut peningkatan dan pertumbuhan ekonomi, pembangunan juga harus ditunjukkan untuk kesejahteraan masyarakat. Khususnya perhatian lebih pada masyarakat yang kurang beruntung agar tidak selalu diasingkan, untuk itu perlu adanya peran pemerintah berupa perlindungan sosial.

Selain itu, Indonesia juga memiliki masyarakat yang sangat banyak, yang akan timbul masalah sosial jika tidak sesuai unsur budaya dan masyarakat yang berdampak pada kehidupan sosial. Masalah sosial dapat didefinisikan sebagai sebuah kondisi yang dipandang oleh sejumlah orang dalam masyarakat sebagai suatu kondisi yang tidak diinginkan. Masalah sosial yang dialami oleh sebagian besar masyarakat ditetapkan lembaga yang memiliki kewenangan khusus seperti pemerintah, organisasi sosial, dan lain sebagainya. \

Dalam lingkungan bermasyarakat ada banyak ditemukan masalah sosial yang merupakan dampak dari masyarakat miskin. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial atau yang sering disingkat menjadi PMKS inilah yang dikategorikan sebagai individu yang memiliki kesulitan serta hambatan memenuhi kebutuhan hidupnya dengan wajar secara jasmani dan rohani dan melakukan fungsi sosial sebagaimana seorang individu semestinya seperti menjalin hubungan dengan individu lain dan lingkungannya karena pada hakikatnya masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang mendapatkan perlindungan sosial dan pelayanan sosial dari negara.

Dinas Sosial merupakan satuan pelaksana pelayanan sosial kepada masyarakat di bawah wewenang Kementerian Sosial Republik Indonesia yang merupakan kementerian yang melayani pemenuhan kebutuhan sosial dan menangani permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Dinas Sosial juga perangkat yang melaksanakan penanganan masalah di bidang sosial dalam cakupan pemerintah daerah dan dipimpin oleh kepala dinas yang memiliki kedudukan dan tanggung jawabnya secara langsung kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah (Website Dinas Sosial, 2019).

Dinas Sosial melakukan beberapa program dalam pelayanan dibidang sosial. Akan tetapi pada merealisasikan program terdapat berbagai macam permasalahan baik itu internal maupun eksternal yang mengakibatkan tidak tercapainya target dari program-program pelayanan kesejahteraan sosial yaitu pencapaian yang ditargetkan oleh Dinas Sosial terhadap rehabilitasi sosial.

Selama ini pemberdayaan bagi PMKS sudah diterapkan di beberapa Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Sumedang yang sering disebut sebagai Kota Tahu memiliki Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya disabilitas sebanyak 6.419, berikut data Penyandang Disabilitas yang tercatat di Dinas Sosial Kabupaten Sumedang:

**Tabel 1. Jumlah Populasi, Target dan Realisasi SPM
Dinas Sosial Kabupaten Sumedang**

| NO | Jenis Penyandang | Jumlah Populasi | TH.2021 | | % | TH.2022 | | % | Ket |
|---------------|--------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|------------|-----|
| | | | Target | Realisasi | | Target | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 25 |
| 1 | Anak Terlantar | 1036 | 616 | 407 | 65,86 | 317 | 317 | 100 | |
| 2 | Disabilitas Terlantar | 1735 | 796 | 442 | 55,53 | 782 | 782 | 100 | |
| 3 | Lanjut Usia Terlantar | 3630 | 1214 | 874 | 72 | 736 | 736 | 100 | |
| 364 | Gelandangan dan Pemulung | 18 | 18 | 15 | 83,34 | 8 | 8 | 100 | |
| Jumlah | | 6419 | 2646 | 1738 | 65,69 | 1843 | 1843 | 100 | |

Sumber: Bidang Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Sumedang Tahun 2023

Tabel di atas merupakan ulasan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang sudah ditangani oleh Dinas Sosial Kota Sumedang Tahun 2021 dan 2022. Sehingga dapat dilihat dari data yang terlampir di atas bahwa jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial diantaranya anak terlantar, disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pemulung yang sudah terealisasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Sumedang.

Dinas Sosial Kabupaten Sumedang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Sosial Kabupaten Sumedang memiliki tugas pokok yakni melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial. Adapun tugas pokok dan fungsi struktur

kelembagaan yaitu Kepala Dinas, Sekretaris, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Bidang Pemberdayaan Sosial.

Sebagai bagian dari pemerintah yang memiliki fungsi pemberdayaan masyarakat khususnya pada Bidang Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Sumedang memberdayakan beberapa Penyandang Disabilitas untuk dibimbing, dibina dan dilatih secara serius guna untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik, seperti mengurangi pengangguran dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan pada penyandang disabilitas di Kabupaten Sumedang dengan beberapa program yang nantinya akan terus diberi pemeriksaan rutin, pemberian makanan bergizi dan motivasi sekaligus diberikan kegiatan yang produktif.

Penyandang disabilitas saat ini masih dipandang sebelah mata, dianggap remeh karena tidak memiliki kesempurnaan secara fisik untuk melakukan suatu pekerjaan atau aktivitas tertentu. Rata-rata penyandang disabilitas memiliki background keluarga yang kurang mampu dan terbelakang. Dari segi kesejahteraan penyandang disabilitas sangat jauh sekali dari perhatian pemerintah dilihat sekarang mulai banyaknya peraturan perundang-undangan ataupun kebijakan yang mengatur tentang hak penyandang disabilitas dari usia balita sampai manula.

Masih banyak dari penyandang disabilitas untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, bekerja apa saja asalkan mendapatkan uang termasuk meminta-minta (mengemis). Untuk menekan biaya pengeluaran, mereka memanfaatkan kolong jembatan, emperan toko dan lain sebagainya untuk mencari tempat tinggal dengan mengabaikan berbagai aspek sosial. Menjadi penyandang masalah kesejahteraan sosial tidak menutup kemungkinan bahwa mereka berkeluarga dan mempertahankan diri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 bagian ke 13 tentang Hak Kesejahteraan Sosial: Dimana hak kesejahteraan sosial untuk penyandang disabilitas meliputi hak rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Berdasarkan undang-undang tersebut dapat dijelaskan bahwa penyandang disabilitas dilindungi oleh negara dan tetap diberikan hak untuk hidup dengan sejahtera tanpa harus adanya diskriminasi antar sesama Masyarakat (Djoko Susano dan Heylen Amildha Yanuarita, 2021). Kemudian menurut Iik Sakinah, Slamet Muchsin dan Suyeno (2020), setiap warga negara memiliki hak yang sama, peluang yang sama dan kedudukan yang sama dihadapan hukum, termasuk mengakui hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia.

Seperti yang diamanatkan Pemerintah berkewajiban untuk pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 Pasal 1 ayat 2 bahwa Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011: Kewajiban negara merealisasikan hak yang termuat dalam konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, hukum dan administrasi dari setiap negara, termasuk mengubah peraturan perundang-undangan, kebiasaan dan praktik-praktik yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, baik perempuan maupun anak, menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik, olah raga, seni dan budaya, serta pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi. Oleh sebab itu perlu penanganan yang lebih komprehensif oleh pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan keluarga agar penyandang disabilitas dapat berfungsi secara sosial.

Sehingga sudah menjadi tugas pemerintah dan pemerintah daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu, karena masyarakat tentunya menginginkan untuk mendapatkan kesejahteraan sesuai dengan kata-kata dalam undang-undang tersebut.

Kondisi penyandang disabilitas diungkap Pendamping Bidang Rehabilitasi pada Dinas Sosial Kabupaten Sumedang yang mengatakan masih banyak hak-hak penyandang disabilitas yang belum terpenuhi. Pemerintah Kabupaten Sumedang masih akan terus berupaya untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan para penyandang disabilitas melalui berbagai pemberian bantuan sosial. Pemberian bantuan sosial berupa barang yang dilakukan oleh Dinas Sosial diantaranya seperti kursi roda, krek, dan ada pula pemberian alat bantu dengar dan pemberian bantuan sosial berupa uang sebagai penunjang modal usaha.

Berdasarkan observasi awal di Dinas Sosial Kabupaten Sumedang, dimana ditemukan berbagai identifikasi permasalahan, antara lain:

1. Sosialisasi program yang dilaksanakan oleh dinas sosial kepada masyarakat masih belum terlaksana secara menyeluruh karena dengan masih adanya warga yang disabilitas belum mengetahui akan program tersebut. Hal ini dibuktikan oleh peneliti selaku warga kabupaten Sumedang belum mengetahui adanya program rehabilitasi penyandang disabilitas tersebut, oleh karena itu sosialisasi yang diberikan Dinas Sosial belum menyeluruh sehingga masih banyak masyarakat Sumedang yang belum mengetahui khususnya penyandang disabilitas.

2. Masih adanya penyandang disabilitas yang belum terdata di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Dinas Sosial Kabupaten Sumedang yang merupakan pendamping disabilitas menyatakan bahwa masih banyak penyandang disabilitas yang belum terdata sehingga belum diketahui atau belum diberikan perhatian oleh Dinas Sosial Kabupaten Sumedang.
3. Keterbatasan anggaran dalam penyelenggaraan program rehabilitasi sosial penyandang disabilitas. hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa program lain yang dimiliki oleh dinas sosial khususnya pada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sehingga harus dibagi-bagi dan anggaran tersebut sangat terbatas.

2. METHOD

Dalam penelitian ini yang diamati adalah Efektivitas Program Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Dinas Sosial Kabupaten Sumedang. Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini diharapkan data dapat lebih lengkap serta bermakna dan pasti, hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh (Sugiyono, 2022), yaitu bahwa metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang nampak.

Dengan demikian, penggunaan metode kualitatif dalam suatu penelitian dapat diperoleh data yang lebih tuntas, memiliki kredibilitas yang tinggi sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.

Teknik yang digunakan dalam mengambil sampel adalah dengan menggunakan *Purposive Sampling*, menurut Sugiyono (2022) “*Purposive Sampling* adalah Teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu”. Setelah mengetahui pendapat di atas dan mengingat keterbatasan penulis dari segi waktu, biaya serta ilmu pengetahuan, maka yang dijadikan sasaran atau informan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 2. Informan Penelitian

| No | Jabatan | Jumlah |
|--------------|--|----------|
| 1. | Sekretaris Dinas | 1 |
| 2. | Pejabat Fungsional Pekerja Ahli Muda Sosial Bidang Rehabilitasi Sosial | 1 |
| 3. | Pendamping Penyandang Disabilitas | 1 |
| TOTAL | | 3 |

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sumedang Tahun 2023

Pegawai yang dijadikan sampel informan penelitian dikarenakan berdasarkan pertimbangan peneliti bahwa sampel informan peneliti yang bersangkutan tersebut dianggap mampu, berkompeten dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di Dinas Sosial Kabupaten Sumedang.

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, disusun dengan dua jenis Teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Studi kepustakaan (*library*), yaitu memperoleh data secara langsung yang biasanya bersifat teoritis dengan cara membaca, mempelajari buku-buku, literatur, catatan-catatan, peraturan tertulis berupa kebijakan-kebijakan, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kajian yang diteliti.
2. Studi Lapangan yang terdiri dari Observasi, Wawancara, Dokumentasi, dan Triangulasi.

Untuk mengolah data hasil wawancara dan observasi, penulis melakukan pengolahan data yang ditempuh dengan mengacu kepada teknik analisis data Model Miles dan Huberman(1984) dalam Sugiyono (Sugiyono, 2022), yaitu:

1. *Data reduction* (Reduksi Data)
2. *Data Display* (Penyajian Data)
3. *Conclusion Drawing/Verification*

3. RESULTS AND DISCUSSION

Dalam mengevaluasi efektivitas program, perlu dilihat seberapa baik program ini memberikan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mulai dari akses layanan kesehatan, hingga peluang kerja. Keterlibatan masyarakat dalam mendukung penyandang disabilitas juga menjadi indikator penting. Evaluasi terhadap alokasi sumber daya seperti anggaran, personel, dan infrastruktur juga diperlukan untuk menilai keberlanjutan program ini. Kemudian, sejauh mana program ini dapat menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan penyandang disabilitas juga menjadi faktor kunci dalam menilai efektivitasnya.

Dalam mengukur efektivitas program, terdapat 4 indikator menurut Budiani (2007) yaitu:

1. Ketepatan sasaran program
2. Sosialisasi program

3. Tujuan program
4. Pemantauan program

Tabel 3. Rekapitulasi Hasil Wawancara Mengenai Efektivitas Program Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Dinas Sosial Kabupaten Sumedang

| No | Dimensi | Indikator | Kesimpulan |
|----|---------------------------|---|---|
| 1. | Ketepatan Sasaran Program | a. Program Direncanakan untuk Mewujudkan Visi Organisasi | Program rehabilitasi sosial dilaksanakan setiap tahun dengan menentukan target yang akan dicapai dan memaksimalkan anggaran yang telah disediakan dari dana APBD. Prosedur pelaksanaan program rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan (SOP). |
| | | b. Prosedur dalam Pelaksanaan Sasaran Program Rehabilitasi Sosial | |
| | | c. Anggaran yang Disiapkan | |
| 2. | Sosialisasi Program | a. Ketepatan dalam Merealisasikan Program | Sosialisasi yang dilakukan Dinas Sosial agar informasi bisa tersampaikan kepada masyarakat yaitu dengan cara mengundang petugas TKSK dari setiap kecamatan dan diberikan informasi terkait program rehabilitasi sosial penyandang disabilitas yang nantinya harus disampaikan kepada seluruh masyarakat. |
| | | b. Informasi kepada Masyarakat | |
| | | c. Komunikasi Pencapaian Sosialisasi | |
| 3. | Tujuan Program | a. Perumusan Program | Program rehabilitasi sosial penyandang disabilitas menggunakan strategi dalam perumusan tujuan untuk meningkatkan pelayanan terhadap penyandang disabilitas. Strategi ini berupa rencana aksi berdasarkan pencapaian program dari tahun sebelumnya yang menjadi acuan pelaksanaan program di tahun berikutnya. Dan dasar pelaksanaannya mengacu kepada Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berlaku. |
| | | b. Penyusunan Program | |
| | | c. Dasar Pelaksanaan | |
| 4. | Pemantauan Program | a. Kegiatan Pengarahan | Kegiatan pengarahan dan evaluasi sangat penting dilakukan karena untuk memastikan bahwa program rehabilitasi sosial penyandang disabilitas menjangkau penerima manfaat secara efektif dan dilaksanakan sesuai rencana. Kegiatan ini melibatkan pemeriksaan dan penilaian rutin untuk memverifikasi keakuratan dan kelayakan bantuan yang diberikan. Prosesnya meliputi verifikasi data, sosialisasi langsung, dan memastikan kelayakan calon penerima bantuan. Selain itu, pemantauan |
| | | b. Kegiatan Pemeriksaan | |

| No | Dimensi | Indikator | Kesimpulan |
|----|---------|-----------|--|
| | | | dan evaluasi dilakukan setiap tiga bulan sekali untuk mengevaluasi akuntabilitas dan melakukan pemeriksaan awal untuk memastikan kelayakan penerima bantuan. |

Sumber: Hasil Wawancara di Dinas Sosial Kabupaten Sumedang Tahun 2023

Berdasarkan uraian diatas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa Efektivitas Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Dinas Sosial Kabupaten Sumedang sudah berjalan dengan cukup baik. Dengan dilaksanakan setiap tahun, program rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mengalami peningkatan dari segi kualitas, kuantitas, atau pun targetnya. Program rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dijalankan setiap tahun dengan fokus pada penentuan target dan optimalisasi anggaran dari APBD. Pelaksanaannya mengikuti SOP untuk memastikan konsistensi prosedur. Dalam upaya sosialisasi, Dinas Sosial mengundang petugas TKSK kecamatan untuk menyampaikan informasi terkait program tersebut kepada masyarakat secara luas. Strategi program ini terdiri dari rencana aksi yang merujuk pada pencapaian tahun sebelumnya dan didasarkan pada UUD 1945. Pengarahan dan evaluasi menjadi kunci dalam memastikan bahwa program tersebut efektif dalam mencapai penerima manfaat serta sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Aktivitas pengarahan ini melibatkan pemeriksaan dan penilaian rutin untuk memverifikasi keakuratan dan kelayakan bantuan yang disediakan, termasuk verifikasi data dan penilaian terhadap calon penerima bantuan. Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala setiap tiga bulan untuk mengevaluasi akuntabilitas dan melakukan pengecekan awal terhadap kelayakan penerima bantuan, memastikan kesesuaian dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan suatu program tentu saja memiliki runtutan dari berbagai tahapan sebagai Upaya untuk mencapai suatu tujuan, yang tentu tidak semua pelaksanaan program tersebut dapat sesuai dengan harapan, hal-hal yang menjadi pengganggu pencapaian tujuan tersebut dapat disebut hambatan yang harus dilakukan upaya pemecahan agar pencapaian program tersebut lebih efektif dan mudah dicapai.

Untuk dapat mengetahui faktor-faktor penghambat apa saja yang dialami dalam pelaksanaan Efektivitas Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Dinas Sosial Kabupaten Sumedang. Ada empat variabel yang menurut Sunggono (1994: 149-154) yang mempengaruhi efektivitas program yaitu:

1. Isi Kebijakan
2. Informasi
3. Dukungan
4. Pembagian Potensi

Berdasarkan uraian diatas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa dalam Efektivitas Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Dinas Sosial Kabupaten Sumedang memiliki beberapa hambatan di dalamnya diantara adalah ketidaksamaan persepsi dan verifikasi data-data yang menyebabkan double data serta anggaran yang terbatas menjadi hambatan utama. Perubahan data dari calon penerima bantuan setelah sosialisasi karena rentang waktu yang Panjang dapat menyebabkan perubahan data yang mempengaruhi jalannya program. Selain itu, kurangnya kejelasan dalam informasi terutama dalam komunikasi pimpinan dan pegawai juga menjadi kendala yang mengganggu pelaksanaan program. Rencana anggaran yang sering tidak sesuai dengan kebutuhan dan keengganan beberapa penyandang disabilitas untuk mengikuti program juga memperumit situasi. Proses sosialisasi program rehabilitasi sosial penyandang disabilitas terhambat karena kurangnya penyebaran informasi yang merata dan menyeluruh. Ditambah dengan penolakan dari anggota yang terdampak disabilitas karena kurangnya pemahaman akan manfaat program, kekurangannya sarana prasarana, serta kurangnya pemahaman mengenai tugas dan fungsi pegawai, kurangnya pengetahuan sumber daya manusia, menyebabkan kurangnya optimalisasi kinerja. Meskipun tugas sudah terbagi dengan baik, implementasinya kurang optimal di lapangan karena kurangnya pemahaman individu akan tanggungjawab mereka dalam program di masa depan.

Dalam setiap program yang dilakukan sudah tentu akan menemui berbagai hambatan dalam mencapai tujuannya namun dari semua hambatan tersebut tentu adanya upaya untuk mengatasi dan menyelesaikannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan di atas maka peneliti dapat menarik kesimpulan mengenai upaya-upaya untuk mengatasi faktor-faktor penghambat efektivitas program pada bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Dinas Sosial Kabupaten Sumedang. Sebagai berikut diantaranya pihak Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Dinas Sosial Kabupaten Sumedang. Mempunyai beberapa upaya bisa dibidang cukup untuk bisa mengatasi faktor penghambat dari mulai memahami kebijakan dengan melaksanakan sosialisasi, melakukan cek verifikasi data, menyampaikan informasi dan memberikan pemahaman secara lebih jelas lagi kepada berbagai pihak yang sedang melaksanakan kebijakan program dengan koordinasi dan

komunikasi, melakukan pendataan penerima bantuan yang dibantu oleh TKSK, melakukan pendekatan kepada keluarga terkait penyandang disabilitas serta mengecek data, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dan memberikan pelatihan peningkatan kualitas SDM dan memberikan motivasi kepada pegawai di bidang Rehabilitas Sosial Penyandang Disabilitas di Dinas Sosial Kabupaten Sumedang.

4. CONCLUSION

Efektivitas program Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Dinas Sosial Kabupaten Sumedang menunjukkan bahwa implementasi program ini telah berhasil. Dinas Sosial telah efektif dalam menjalankan program dan mitra kerja TKSK juga telah dilaksanakan dengan baik. Program rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di Dinas Sosial Kabupaten Sumedang dirancang dengan fokus pada penetapan target dan pengelolaan anggaran dari APBD, serta implementasi SOP untuk menjaga konsistensi dalam prosedur. Dalam upaya sosialisasi, pihak Dinas Sosial mengundang petugas TKSK kecamatan untuk menyampaikan informasi program secara luas kepada masyarakat. Strategi program didasarkan pada pencapaian sebelumnya dan UUD 1945. Pengarahan dan evaluasi menjadi kunci dalam memastikan efektivitas program, melibatkan pemeriksaan dan penilaian berkala untuk memverifikasi keakuratan bantuan dan calon penerima bantuan. Pemantauan dan evaluasi dilakukan setiap tiga bulan untuk menilai akuntabilitas dan kelayakan penerima bantuan serta memastikan kesesuaian dengan rencana yang telah ditetapkan.

Namun, terdapat beberapa hambatan yang mengganggu efektivitas program. Diantaranya adalah ketidaksamaan persepsi dan verifikasi data yang mengakibatkan adanya data ganda, serta keterbatasan anggaran. Perubahan data penerima bantuan setelah proses sosialisasi karena rentang waktu yang panjang juga berdampak pada jalannya program. Kurangnya kejelasan informasi, khususnya dalam komunikasi pimpinan dan pegawai, serta rencana anggaran yang tidak selalu sesuai, menjadi kendala lainnya. Proses sosialisasi terkendala oleh kurangnya penyebaran informasi yang merata dan penolakan dari penyandang disabilitas karena kurangnya pemahaman akan manfaat program, kurangnya fasilitas, dan pemahaman yang minim terkait tugas pegawai.

Meskipun telah dilakukan sejumlah upaya, seperti pemahaman kebijakan melalui sosialisasi, verifikasi data, penyampaian informasi yang lebih jelas, serta peningkatan kualitas SDM, implementasi program masih terhambat oleh keterbatasan anggaran yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut, serta kurangnya pemahaman individu yang bertanggung jawab dalam program di masa depan. Dengan demikian, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan, langkah-langkah ini menunjukkan komitmen untuk terus meningkatkan efektivitas program rehabilitasi penyandang disabilitas di Dinas Sosial Kabupaten Sumedang.

REFERENCES

- Abidin, S. Z. (2012). *Kebijakan Publik*. Jakarta Selatan: Salemba Humanika.
- Atmosudirjo, P. (2011). *Administrasi dan Manajemen Umum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hadayaningrat, S. (1996). *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Haji Masagung.
- Kurniawan, A., & Sutawijaya, I. N. (2023). *Audit Kinerja Kebijakan Publik*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Maksudi, B. I. (2018). *Dasar-Dasar Administrasi Publik*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Meutia, I. F. (2017). *Analisis Kebijakan Publik*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.
- Nawawi. (2009). *Perilaku Administrasi Kajian, Teori, dan Praktis*. Surabaya: ITSPers.
- Rangkuti. (2015). *Teknik Menyusun Strategi Korporat Yang Efektif Plus Cara Mengelola Kinerja dan Risiko*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Robbins, P. S., & Timothy, A. J. (2014). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sawir, M. (2021). *Ilmu Administrasi Dan Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: CV BUDI UTAMA.
- Setiawan. (2005). *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen, Sistem Pelipat Ganda, Kinerja Perusahaan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Siagian. (2014). *Administrasi Pembangunan : Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Silalahi. (2016). *Studi Tentang Ilmu Administrasi Konsep Teori dan Dimensi*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Subarsono. (2006). *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA, cv.
- Sunggono. (1994). *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tangkilisan. (2005). *Manajemen Publik*. Jakarta: Grasindo.
- Toha. (2002). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada.